

Workshop Evaluasi Program Kemitraan PUSHAM UII dan AKPOL Semarang  
Dalam Rangka Penguatan dan Pengembangan Mutu Pendidikan  
di AKPOL Semarang

*Hotel Santika Premiere Semarang, 8 – 9 Oktober 2013*

---

# MAKALAH



## PENDIDIKAN (KEPOLISIAN) SEBAGAI HARAPAN PERBAIKAN BANGSA DAN NEGARA

*Oleh:*

*Prof Dr. Ki Supriyoko, S.D.U., M.Pd*



**Ki Supriyoko:**

## **PENDIDIKAN (KEPOLISIAN) SEBAGAI HARAPAN PERBAIKAN BANGSA DAN NEGARA**

**< φ >**

### **A. Pendahuluan**

Negara-negara di dunia setidaknya-tidaknya dapat diklasifikasi menjadi tiga kelompok; masing-masing adalah kelompok negara maju (*developed countries*) diantaranya Amerika Serikat (AS), Jepang, Perancis dan Australia; kelompok negara berkembang (*developing countries*) diantaranya Malaysia, Saudi Arabia, Mesir Argentina; serta kelompok negara terbelakang (*underdeveloped countries*) diantaranya adalah Afganistan, Ethiopia, Burkina Faso, dan Timor Leste.

Kiranya sudah menjadi pendapat umum, utamanya masyarakat intelektual dan cendekiawan bahwa semakin baik penanganan pendidikan, utamanya pendidikan tinggi, semakin maju suatu negara; sebaliknya makin tidak baik penanganan pendidikan, utamanya pendidikan tinggi, semakin terbelakang suatu negara.

---

<φ> Makalah Dipresentasi dalam Workshop Evaluasi Program Kemitraan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan Akpol Semarang Dalam Rangka Penguatan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Akpol Diselenggarakan oleh Pusham UII dan Akademi Kepolisian Semarang Semarang: Hotel Santika Premiere Semarang, 8 Oktober 2013

Di negara-negara maju umumnya terdapat banyak perguruan tinggi yang berkualitas dan dikenal oleh masyarakat dunia; misalnya di AS ada *Harvard University* (Cambridge, Massachusetts) dan *California Institute of Technology* (Pasadena, California); di Jepang terdapat *Tokyo University* (Bunkyo, Tokyo) dan *Waseda University* (Shinjuku, Tokyo); di Perancis terdapat *Universite Sorbonne* (Paris) dan *Universite Science et Technique du Languedoc* (Montpellier); sementara itu di Australia ada *Australian National University* (Acton, ACT) dan *Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) University* (Melbourne, Victoria).

Di negara-negara berkembang relatif sedikit perguruan tinggi yang dikenal masyarakat dunia; sementara itu di negara-negara terbelakang tidak ada perguruan tinggi yang dikenal masyarakat dunia, bahkan nama negaranya pun terkadang tidak dikenal masyarakat dunia seperti Mozambiq, Eritrea, Niger, Guinea-Bussau, Liberia, Burundi dan Dominika Kongo.

## **B. Pendidikan Indonesia**

Indonesia adalah negara berkembang yang diapit oleh negara-negara maju (Singapura dan Australia), negara-negara berkembang (Malaysia dan Brunei Darussalam) serta negara-negara terbelakang (Papua Nugini dan Timor Leste). Pendidikan di Indonesia kualitasnya relatif rendah kalau dibandingkan dengan pendidikan di negara-negara maju, relatif setara kalau dibandingkan dengan pendidikan di negara-negara berkembang, dan relatif lebih tinggi kalau dibandingkan dengan pendidikan di negara-negara yang masih terbelakang.

Dalam laporan UNDP yang didasarkan pada indikator pendidikan, ekonomi dan kesehatan (termasuk kependudukan), “*Human Development Report 2012*”, posisi Indonesia hanya berada di peringkat ke-121 dari 197 negara anggota PBB. Dalam laporan ini dituliskan Norwegia di peringkat ke-1, Australia ke-2, AS ke-3, Belanda ke-4 dan Jerman ke-5. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan (ekonomi dan kesehatan) Indonesia relatif rendah; jauh di bawah Norwegia, Australia, AS, Belanda dan Jerman.

Dalam laporan tersebut juga dituliskan bahwa Singapura berada di peringkat ke-19, Brunei Darussalam ke-30, Malaysia ke-64, Thailand ke-103, dan Filipina ke-114. Keadaan ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan (ekonomi dan kesehatan) Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara pada umumnya.

Dari data tersebut yang paling menggemaskan adalah ketertinggalan pendidikan Indonesia dibanding Malaysia. Mengapa menggemaskan? Oleh karena beberapa tahun yang lalu Malaysia menjadi murid Indonesia; di satu sisi banyak guru Indonesia yang didatangkan ke Malaysia, demikian pula dengan dosen Indonesia yang dihadirkan ke Malaysia dalam beberapa tahun untuk membina pendidikan Malaysia. Banyak guru Indonesia yang harus membangun dan mengembangkan pendidikan pada sekolah-sekolah di Malaysia; demikian pula banyak dosen Indonesia yang harus membangun dan mengembangkan pendidikan pada berbagai perguruan tinggi di Malaysia. Penulis sendiri pada tahun 1992 berkesempatan menjadi dosen tamu di Universiti Malaya (UM), suatu perguruan tinggi yang sekarang menjadi kebanggaan bangsa Malaysia pada umumnya.

Pada sisi yang lain banyak pemuda Malaysia yang dikirim untuk belajar di Indonesia; utamanya di UGM Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ITB Bandung, IPB Bogor dan UI Jakarta. Itu semua menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia pada waktu itu lebih tinggi daripada Malaysia dan sudah sewajarnya kalau Malaysia “berguru” pada Indonesia. Memang itulah hebatnya Malaysia, mau “berguru” ke negara lain manakala kualitas pendidikannya lebih rendah.

Sekarang kondisinya berbalik 180 derajat; tidak lagi banyak pemuda Malaysia yang dikirim untuk belajar di Indonesia akan tetapi justru banyak pemuda Indonesia yang belajar di Malaysia; utamanya di Universiti Malaya (UM), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), dan Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Keadaan ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia tidak lagi lebih tinggi dibandingkan Malaysia akan tetapi justru (cenderung) lebih rendah. Data yang dipublikasi UNDP juga mengindikasikan hal yang sama; *human development index* (HDI) Malaysia (ke-64) lebih tinggi dibandingkan Indonesia (ke-121).

Wakil Presiden Indonesia, Boediono, secara terus terang mengakui rendahnya pendidikan Indonesia. Dalam tulisan berjudul “Pendidikan Kunci Pembangunan” (*Kompas*, 27 Agustus 2012), beliau menulis bahwa sampai sekarang ini kita belum memiliki konsepsi yang jelas mengenai substansi pendidikan. Karena tak ada konsepsi yang jelas, timbullah kecenderungan untuk memasukkan apa saja yang dianggap penting ke dalam kurikulum. Akibatnya, terjadilah beban yang berlebihan pada anak didik. Bahan yang diajarkan terasa “berat”, tetapi tak jelas apakah anak mendapatkan apa yang seharusnya diperoleh dari pendidikannya.

Lebih lanjut dinyatakan substansi dasar yang memberikan isi pada kebijakan pendidikan kita perlu dibakukan. Rumusan substansi yang jelas dan cermat akan dapat menjadi kompas dan perajut bagi begitu banyak kegiatan dan inisiatif pendidikan di Tanah Air sehingga mengurangi segala macam kemubaziran. Rumusan substansi tersebut haruslah mengacu dan diturunkan dari konsepsi yang jelas mengenai bagaimana kemajuan bangsa terjadi dan apa peranan pendidikan di dalamnya.

Selanjutnya Pak Boediono menulis lagi dalam judul “Pendidikan bagi Semua” (*Kompas*, 3 Oktober 2013). Dalam tulisan kali ini beliau mengakui bahwa pelayanan pendidikan (bermutu) belum dapat dirasakan oleh setiap anak Indonesia yang tinggal di pelbagai daerah. Wakil Presiden RI tersebut mendambakan sistem pendidikan nasional yang mampu mendukung setiap anak Indonesia di pelosok mana pun tinggal dan apa pun latar belakang sosial ekonominya dapat dengan mudah dan murah memperoleh pendidikan yang bermutu. Sekarang ini belum semua anak Indonesia bisa menikmati pelayanan pendidikan (bermutu) dengan mudah dan murah.

Untuk merealisasi dambaannya tersebut maka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), menurut Pak Boediono, sangat diperlukan adanya. Dengan memanfaatkan TIK maka penerapan pembelajaran *online* atau *e-learning* dipandang menjadi pilihan yang tepat. Bahkan dengan tegas Pak Boediono menyatakan sistem e-learning yang berskala nasional perlu segera kita bangun. Apabila didesain dengan baik maka e-learning dapat menjawab sebagian besar dari hambatan untuk melayani pendidikan bagi setiap anak Indonesia.

Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS) dan Inggris, penerapan pembelajaran online sudah dilakukan baik di perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah. Sistem pembelajaran ini diakui mempercepat proses penyebaran informasi sehingga bahan-bahan pembelajaran di dalam kelas bisa diambil yang paling aktual.

Ambil contoh: begitu berita penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, diunggah ke internet maka pada saat itu juga dapat diakses oleh siapa saja di seluruh dunia; termasuk siswa dan guru sekolah serta mahasiswa dan dosen perguruan tinggi. Kasus ini segera dibahas oleh mahasiswa dan dosen fakultas hukum pada berbagai perguruan tinggi di AS seperti *Harvard University* di Massachusetts, *Princeton University* di New Jersey, *University of California at Los Angeles* di California, *Syracuse University* di New York, dan perguruan tinggi lain di AS pada umumnya.

Kasus tersebut resmi menjadi bahan kuliah dan/atau bahan kajian di perguruan tinggi. Dengan demikian mahasiswa dan dosen secara langsung dapat membandingkan teori yang tertulis dalam berbagai referensi akademis dengan realitas yang terjadi dalam praktik penyelenggaraan negara. Sangat cepatnya penyajian informasi aktual ini menjadi salah satu *benefit* yang diperoleh dari praktik e-learning di perguruan tinggi. Itulah sebabnya perguruan tinggi di negara maju, dalam hal ini di AS, menjadi institusi yang mampu menyajikan informasi aktual secara cepat kepada mahasiswa dan dosennya. Itu pula sebabnya mahasiswa dan dosen di AS umumnya menjadi personal yang percaya diri dikarenakan terbiasa dengan cepat menguasai informasi aktual.

Apakah hal yang sama dapat dilakukan oleh perguruan-perguruan tinggi di Indonesia? Perguruan tinggi sekualitas ITB Bandung, UI Jakarta, UGM Jakarta, Undip Semarang dan Unair Surabaya barangkali dapat melakukannya; namun mayoritas perguruan tinggi di Indonesia, PTN dan PTS yang jumlahnya 3.400-an belum dapat melakukannya. Kita tidak perlu heran kalau di era informasi sekarang ini masih banyak perguruan tinggi di Indonesia belum dapat mengakses internet dengan memadai, baik dikarenakan infrastruktur teknologi informasinya yang belum baik maupun kualitas manusianya yang belum memadai.

### **C. Pendidikan Akpol**

Meskipun kualitas pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, di Indonesia belum optimal bukan berarti kualitas pendidikan pada akademi kepolisian (akpol) harus mengikuti arus didalamnya. Sebagai satu intitusi perguruan tinggi yang memiliki visi terwujudnya lembaga pendidikan pembentukan Perwira Polri yang berkualitas, untuk melahirkan Perwira Polri yang praktisi dan akademisi sebagai kader pemimpin Polri masa depan, sesuai Strata kepangkatan dan struktur organisasi yang tergelar, jujur, bersih, profesional, bermoral, modern dan dipercaya masyarakat maka akpol menyajikan pendidikan yang tidak berkualitas.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di akpol kiranya perlu dilakukan langkah-langkah antara lain menyangkut sistem seleksi taruna baru, peningkatan kualitas tenaga pendidik (gadik) internal, serta akreditasi program studi (prodi) dan institusi.

Sistem seleksi taruna baru Akpol harus dilakukan secara terstandar, objektif dan transparan. Terstandar artinya sesuai dengan standar polisi mencakup pendidikan, fisik, emosi dan moralnya. Objektif artinya harus dilaksanakan secara apa adanya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sebelumnya; sedangkan transparan artinya prosesnya dapat diikuti oleh masyarakat terutama kelompok masyarakat yang berkepentingan dengan seleksi tersebut.

Berita pada berbagai media massa, media elektronik dan media sosial yang menyatakan putera ajudan Wakapolri, putera Wakil Gubernur Akpol, putera Wakil Kapolda Kalimantan Barat, dan putera Irwasum tidak lulus dan tidak terpilih dalam seleksi calon taruna akpol tahun 2013 merupakan berita positif yang dapat membangun kepercayaan masyarakat. Apalagi sumber berita tersebut adalah Wakil Kapolri Komjen Polisi Nanan Sukarna sendiri. Sebagaimana diberitakan, jumlah pendaftar calon taruna di seluruh Indonesia sebanyak 19.327 orang, terdiri dari 17.208 pria dan 2.119 wanita; dan setelah melalui seleksi di wilayah Polda masing-masing jumlah calon taruna yang sampai tahap akhir seleksi sebanyak 439 orang (*[www.tribun-news.com](http://www.tribun-news.com), diunduh 6 Oktober 2013*).

Peningkatan kualitas dan profesionalitas gadik akpol kiranya sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Bagaimana pun gadik pada suatu institusi pendidikan (dan latihan) akan sangat menentukan kualitas pada institusi pendidikan bersangkutan. Semakin berkualitas gadik maka semakin berkualitas institusi pendidikan (dan latihan), semakin tidak berkualitas gadik maka semakin tidak berkualitas institusi pendidikan (dan latihan) bersangkutan; oleh karena itu kualitas gadik harus terstandar.

Gadik Internal Akpol Semarang sebanyak 147 orang yang terdiri dari 2 orang (1,4 persen) berpendidikan S3, 24 orang (16,3 persen) berpendidikan S2, 73 (49,7 persen) berpendidikan S1, 2 orang (1,4 persen) berpendidikan D3 dan sebanyak 46 orang (31,2 persen) berpendidikan SMU ([www.akpol.ac.id](http://www.akpol.ac.id), diunduh 6 Oktober 2013). Dari angka ini terlihat bahwa sepertiga gadik Akpol Semarang berpendidikan D3 dan SMU.

Apabila Akpol Semarang merupakan akademi sebagai bentuk suatu perguruan tinggi sebagaimana yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU No.12 tahun 2012 maka gadik yang berpendidikan diploma dan SMU harus segera diberhentikan karena tidak memiliki kewenangan untuk mengajar di perguruan tinggi; dalam hal ini akademi merupakan perguruan tinggi dan gadik merupakan dosen di perguruan tinggi. Pada sisi yang lain apabila Akpol Semarang bukan merupakan akademi sebagai bentuk suatu perguruan tinggi sebagaimana dalam Pasal 59 ayat (1) UU No.12 tahun 2012 maka gadik yang berpendidikan diploma dan SMU bisa dipertahankan atau harus diberhentikan tergantung pada aturan main yang berkait dengan pendirian Akpol Semarang itu sendiri.

Terlepas dari Akpol Semarang merupakan bentuk perguruan tinggi atau bukan, peningkatan kualitas gadik kiranya perlu dilakukan baik melalui pendidikan formal berupa studi lanjut, terkecuali yang sudah berpendidikan S3, maupun melalui pendidikan nonformal seperti kursus dan pelatihan.

Kejelasan Akpol Semarang sebagai perguruan tinggi atau bukan juga sangat diperlukan berkait dengan pelaksanaan akreditasi yang merupakan bentuk evaluasi eksternal institusi yang bersangkutan.

Apabila Akpol Semarang merupakan suatu bentuk perguruan tinggi maka mau tidak mau harus mengikuti akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Akreditasi ini meliputi dua macam; masing-masing akreditasi untuk program studi atau yang dikenal dengan akreditasi prodi serta akreditasi untuk institusi atau yang dikenal akreditasi institusi perguruan tinggi (AIPT). Akreditasi ini merupakan penjaminan mutu eksternal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UU No.12 Tahun 2012.

Apabila Akpol Semarang bukan merupakan suatu bentuk perguruan tinggi bukan berarti tidak perlu menjamin mutu pendidikan (dan pelatihan); namun penjaminan mutunya tidak harus dilakukan melalui akreditasi akan tetapi bisa menggunakan sistem penjaminan mutu eksternal nonakreditasi misalnya melalui *International Standards Organization (ISO)* !!!\*\*\*\*\*

---

**BIODATA SINGKAT;**

Nama : Prof. Dr. Ki Supriyoko, S.D.U., M.Pd.

Kerja Sampingan:

1. Wakil Presiden Pan-Pacific Association of Private Education di Jepang
2. Wakil Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa
3. Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
4. Direktur Pascasarjana Pendidikan UST Yogyakarta
5. Pembina Sekolah Unggulan "Insan Cendekia" Turi, Sleman, Yogyakarta
6. Pendiri dan pengasuh Pesantren "Ar-Raudhah" Yogyakarta
7. Ketua RT-29 Celeban Baru Yogyakarta tahun 1981 sd sekarang (32 tahun)